



RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO

2025

JL. DAMAR NO. 831 KEL. PASIR PUTIH KEC. RIMBO TENGAH,
TELP. (0747) 21013 KODE POS 37214 , MUARA BUNGO



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Damar Nomor 831, Pasir Putih, Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi 37214

Telepon 0747-7332849, Faksimile 0747-7332849

Laman www.nakertrans.bungokab.go.id Pos-el nakertransbungobaru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja organisasi yang dapat mencapai tujuan dan sasaran Utama serta kendala-kendala yang dicapai dalam mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan aset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang – undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - c. Bahwa nama- nama yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan satuan tugas (satgas) tersebut.
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
 - a. Membuat Laporan target dan realisasi rencana kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - b. Membuat Laporan realisasi Rencana kerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan 2023 dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membuat Laporan rencana kerja sampai dengan tahun 2024 dengan target rencana kerja tahun 2025 yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - d. Menganalisis penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - e. Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - f. Menganalisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian kinerja
2. Ketua
 - a. Mengkoordinir penyusunan laporan Rencana Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;

3. Koordinator
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan dan pembuatan Rencana kerja pada masing – masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - b. Mengkoordinasi Target Realisasi Rencana Kerja tahun 2025 Perkiraan Maju tahun 2026 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - c. Mengkoordinasi Rencana Kerja tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Perencanaan strategis Organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
 - d. Mengkoordinir dan menganalisa Program /kegiatan yang menunjang pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing – masing wilayah kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
4. Anggota
 - a. Memberi saran dan membantu penyusunan rencana Kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
 - b. Membantu pengumpulan data rencana kerja tahun 2025 dengan tahun 2024 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 1 (SATU) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 14 Februari 2024


KEPALA DINAS
ZAMRONI, S.Ag.
NIP. 19700914 199203 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 14 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KINERJA
(RENJA) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUNGO TAHUN
2023

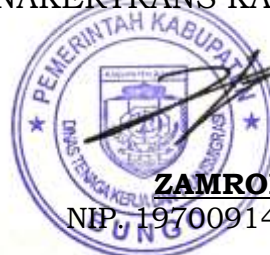
SUSUNAN TIM

PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

1. Penanggung Jawab : ZAMRONI, S.Ag.
NIP. 19700914 199203 1 003
2. Ketua : SUJASNO IRAWAN, ST.
NIP. 19730810 200604 1 005
3. Koordinator : KHAIRUL HUDA, S.IP.
NIP. 19690123 199002 1 001
4. Anggota : 1. SYUSANTI RAHMIYANTI, SE.
NIP. 19770816 201101 2 004
2. YOGI SUGAMA, SE.
NIP. 19870819 201101 1 004
3. Ir. ANDRA HIDRIANTO
NIP. 19681013 200701 1 025
4. LYZIA PERMATA MARDIZAN, S.AP

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 14 Februari 2024

KEPALA DINAS
NAKERTRANS KABUPATEN BUNGO



ZAMRONI, S.Ag.

NIP. 19700914 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah, SWT, karena atas izin dari Nya-lah maka kami dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

Penyusunan RENJA ini sangat penting untuk setiap OPD yang ada, karena dengan RENJA kita dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD untuk tahun selanjutnya dan data menjalankan semua program yang ada di setiap OPD, serta dengan adanya Renja kita juga dapat melihat keberhasilan pencapaian Misi, Visi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan visi misi Bupati Bungo yang tertuang dalam RPJMD Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2026, penyusunan RENJA ini pada dasarnya diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta bagian Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
22. Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026

Sesuai dengan Peraturan diatas pada dasarnya penyusunan RENJA ini secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan perencanaan terhadap seluruh program dan kegiatan prioritas yang ada.

Sebagai suatu Dinas yang mewadahi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Dusun bertanggung jawab terhadap seluruh perkembangan dusun, baik buruknya suatu dusun tergantung dengan kinerja dari Dinas ini.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo harus bisa merumuskan kebijakan seefisien mungkin, untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan fokus dan jelas, dan berupaya menggunakan anggaran seefisien mungkin apalagi dengandana yang terbatas, dengan penggunaan dana yang tepat akan jadi penentu keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

Setiap hal yang dilakukan pasti ada kekurangan oleh Karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami butuhkan agar kedepannya lebih sempurna. Demikianlah laopran ini dibuat dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Muara Bungo, 02 Januari 2025

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**



ZAMRONI, S.Ag.

NIP. 19700914 199201 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I.....	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.3.1 Maksud	11
1.3.2 Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	28
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III.....	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV.....	43
BAB V	50

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan rencana kerja (Renja) SKPD, Renja SKPD memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, Penyusunan Renja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tahun 2025 mengacu pada, RKPD, Rencana strategis (Renstra) SKPD, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo periode 2021-2026 dimana sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Bungo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026.

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta bagian struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) satuan kerja perangkat daerah tahun 2025 ini disusun berdasarkan pandangan kedepan "Aktualisasi" pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang seharusnya diberikan kepada

masyarakat dan jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

Kondisi tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang masih diyakini dapat terkendali dengan baik apa bila Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan mendapat dukungan maksimal dari instansi dan mitra kerja lainnya.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam periode Tahun anggaran 2025. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap OPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD, dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggung jawaban Kepala Daerah.

RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Dinas tenagakerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2025. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan

OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 yaitu :

“ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Berkualitas, Maju dan Sejahtera “

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo, misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tenaga kerja terampil produktif dan Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja serta kuantitas Tenaga Kerja
2. Mewujudkan hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang dan meningkatkan perlindungan Tenaga Kerja .
3. Mewujudkan mobilitas penduduk yang terarah, memfasilitasi perpindahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Transmigrasi
4. Meningkatkan SDM tata kelola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pengembangan sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai ladsan landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penyeleggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 4 Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Tatacara dan Susunan organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit.
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 /MEN/VIII/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Nakertrans.
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2009 nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta bagian Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
16. Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas tanpa mengabaikan aspek kualitas melalui pemantapan, koordinasi lintas sektor dan lintas program.
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih kedalam Program dan kegiatan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2025;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar Desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;

3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja satuan perangkat daerah (Renja-SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2025 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-2), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: factor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai dokumen jangka Menengah.

Kualitas penyusunan Renja PD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan pencapaian Renstra OPD

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024, capaian Rencana Kerja Tahun 2024 dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program/kegiatan tahun 2024 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Dana APBD tahun Anggaran 2024 dan dana transfer bagi hasil tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.935.547.211

- Belanja Langsung Rp. 3.839.187.401
- Belanja Tidak Langsung Rp. 1.067.523.810

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta bagian Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo .

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa

yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bungo selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025 untuk Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2024.

Berikut ini adalah realisasi target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2024.

**Tabel 1. Capaian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Kabupaten Bungo**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Traget	Realisasi
1	Mengembangkan kawasan transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi	Persen	0.72 %	0.72 %
2	Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5.88 %	5.88 %

SUMBER : PK DINAS NAKERTRANS

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat kita lihat capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2024 sasaran dan indikator kinerja yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Bidang Ketenagakerjaan

Kerberhasilan yang telah dicapai dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ditentukan dalam pelaksanaan program dan renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 APBD Kabupaten Bungo. Adapun program yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang di tetapkan pada tahun 2024 :

1.	Program	:	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Kegiatan	:	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
	Penyelesaian Pekerjaan	:	100%
	Anggaran	:	Rp. 216.999.250
	Realisasi Keuangan	:	Rp. 216.999.250
	Persentasi Realisasi	:	99,97%
	Kegiatan	:	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

	Penyelesaian Pekerjaan	:	100%
	Anggaran	:	Rp. 12.366.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp. 12.366.000
	Persentasi Realisasi	:	100%
2	Program	:	Penempatan Tenaga Kerja
	Kegiatan	:	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelesaian Pekerjaan	:	100%
	Anggaran	:	Rp. 57.000.200
	Realisasi Keuangan	:	Rp. 57.000.200
	Persentasi Realisasi	:	99.84%
3	Program	:	Program Hubungan Industrial
	Kegiatan	:	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelesaian Pekerjaan	:	100%
	Anggaran	:	Rp. 5.298.880
	Realisasi Keuangan	:	Rp. 5.298.880
	Persentasi Realisasi	:	100%
	Kegiatan	:	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Penyelesaian Pekerjaan	:	100%
	Anggaran	:	Rp. 11.700.880
	Realisasi Keuangan	:	Rp. 11.700.880
	Persentasi Realisasi	:	100%

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja

untuk tahun 2024 diperoleh hasil capaian kinerja bidang ketenagakerjaan di dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dikategorikan sebagai Instansi yang hasilnya baik dalam pencapaian kinerjanya.

Bidang ketenagakerjaan menyadari bahwa masih ada kelemahan / kekurangan yang harus diperbaiki untuk Mencapai kinerja yang baik ,untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan /kegagalan tersebut sebagai umpan balik /feed back akan dilaksanakan beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semua program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang sesuai direncanakan pada tahun 2024.
- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2024 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak ada Realisasi program/kegiatan dikarenakan kegiatan tidak terlaksana seluruhnya penyebabnya pemangkasan anggaran kegiatan sebanyak 85% .
- d. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat tercapai sesuaiharapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat

perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD dari progam dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang diambil untuk mengatasi factor-factor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan kesadaran pengusaha dan karyawan dalam mengatasi peraturan perUndang-undangan Ketenagakerjaan.

2. BIDANG TRANSMIGRASI

Adapun Program dan kegiatan yang Telah di Laksanakan atau yang telah di realisasi sesuai dengan paguanggaran ditetapkan anggaran 2024 adalah :

3	Program	:	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
	Kegiatan	:	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

	Penyelesaian Pekerjaan	:	100%
	Anggaran	:	Rp. 30.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp. 30.000.000
	Persentasi Realisasi	:	99,07%
3.	Program	:	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
	Kegiatan	:	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian
	Penyelesaian Pekerjaan	:	100%
	Anggaran	:	Rp. 50.000.000
	Realisasi Keuangan	:	Rp. 50.000.000
	Persentasi Realisasi	:	99,46%

Keberhasilan membangun SDA dan SDM merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Capaian kinerja pelayanan SKPD belum sepenuhnya tercapai dikarenakan kebutuhan/binaan yang akan dilaksanakan dilokasi sama dengan kebutuhan dari instansi lain.

Program yang dilaksanakan pada bidang Transmigrasi sebenarnya sudah cukup menyentuh masyarakat desa, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat transmigrasi hidup dari usaha pertanian, dan sektor-sektor lain yang memacu pertumbuhan ekonomi dipedesaan. Program yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan pertumbuhan bagi ekonomi keluarga maupun peningkatan ekonomi pedesaan, serta adanya hubungan kerja sama antar pihak terkait dalam hal penyusunan program, sehingga program tersebut bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Bungo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	77,5	73,5	75,5	75,5	100%	76,5	225,5	291%
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja)Dinas Nakertrans yang tersedia	2	2	2 Dokumen	2	100%	2	6	300%
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA tersusun	1	1	1 Dokumen	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKAP-SKPD tersusun	1	1	1 Dokumen	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD tersusun	1	1	1 Dokumen	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA - SKPD tersusun	1	1	1 Dokumen	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang tersusun	2	2	2 Laporan	2	100%	2	6	300%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujutnya Pengelola Keuangan sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	300%
2.07.01.2.02.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia	14	14	14 bulan	14	100%	14	42	300%
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang tersusun	1	1	1 Laporan	1	100%	1	3	300%

2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan /Triwulan /Semester yang tersusun	4	4	4 Laporan	4	100%	4	12	300%
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujutnya laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP	3	3	3	3	100%	3	9	300%
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan Roda empat yang diasuransikan	3	3	3	3	100%	3	9	300%
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase peningkatan SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang disediakan	69	53	68 Stel	68	100%	136	257	372%
2.07.01.2.05.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	jumlah pakaian batik yang disediakan	69	53	68 Stel	68	100%	0	121	175%
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah PNS yng Mengikuti Pelatihan SDM	15	15	15	15	100%	15	45	300%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	13	13	13 Jenis	13	100%	13	39	300%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	10	18	10 Unit	18	100%	18	54	540%
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Peralatan, dan Bahan Pembersih Kantor	50	50	50 Jenis	50	100%	50	150	300%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan barang pengadaan yang tersedia	12	12	12 Jenis	12	100%	12	36	300%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	40	40	40 jenis	40	100%	40	120	300%
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pameran Pembangunan	1	1	1 Kegiatan	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang tersedia	1005	1	1005 kotak	1	100%	1	3	0%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	68	1	68kali	1	100%	1	3	4%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	1	300%	300%
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia (kursi kerja) Kursi Direktur Kursi Rapat Lemari Arsip Meja Panjang	41	45	20 unit 25buah	45	100%	45	135	329%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	1	1	4000 Surat	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	1	1	12 Bulan	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium non pns yang tersedia	1	1	12 Bulan	1	100%	1	3	300%
2.07.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dgn baik	3	3	3 Unit	3	100%	3	9	300%
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	40	40	40 Unit	40	100%	40	120	300%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	3	3	3 Gedung	3	100%	3	9	300%
2.07. 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan	20,16%	36,08%	41,24%	41,24%	100%	41,24%	119%	588%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	320	560	640 orang	640	100%	640	1840	575%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	320	560	640 orang	640	100%	640	1840	575%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya LKPS yang berkompeten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah LPKS yang dibina	10	10	10 LPKS	10	100%	10	30	300%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Teraftar yang Ditempatkan dan di	90,53%	90,53%	90,53%	90,53%	100%	90,53%	272%	300%
2.07.04.2.01	Pelayanan Pencari Kerja	Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	650	650	650 orang	650	100%	650	1950	300%
2.07.04.2.03	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	Terwujudnya IPK online dan Penempatan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data IPK yang terlapor	500	500	500 data	500	100%	500	1500	300%
2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Job Fair	800	800	800 orang	800	100%	800	2400	300%
2.07.04.2.03.04	Pelayanan Bursa Kerja KHUsus (BKK)	Jumlah Bursa Kerja Khusus yang di Bina	6	6	6 BKK	6	100%	6	18	300%
2.07.04.2.04	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan tenaga kerja Dalam Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
2.07.04.2.04.01	Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah kelompok Usaha yang Dibina	3	3	3	3	100%	3	9	300%
2.07.04.2.05	Perpanjangan IMTA (RPTKA)	Terwujudnya Perpanjangan IMTA (RPTKA)	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA (RPTKA)	Jumlah TKA yang terkoordinasi	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	98%	93%	95%	95%	100%	97%	285%	291%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja	6	6	6	6	100%	6	18	300%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan	Jumlah sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdata	8	7	8 Perusahaan	8	100%	8	23	288%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	pengusaha								
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang di deteksi	70	50	55 Perusahaan	55	100%	65	170	243%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	40	40	40	40	100%	40	120	300%
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah organisasi Serikat Pekerja/Serikat buruh yang diverifikasi	10	10	10	10	100%	10	30	300%
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat	100%	76,81%	84,75%	84,75%	100%	92%	254%	254%
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Penempatan Masyarakat kawasan transmigrasi	1000	1000	1000	1000	100%	1000	3000	300%
3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	jumlah masyarakat Transmigrasi yang telah memiliki hak kepemilikan lahan	1000	1000	1000	1000	100%	1000	3000	300%
03:32:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Berkembangannya kawasan Transmigrasi	93,25%	57,25%	65,75%	65,75%	100%	79,25%	202%	217%
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Terwujudnya pengembangan SDM kemandirian satuan permukiman transmigrasi	1,05	1,05	1,05	1,05	100%	1,05	3	300%
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah masyarakat kawasan transmigrasi yang mengikuti pelatihan ekonomi Sosial dan Budaya	40	40	40	40	100%	40	120	300%
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah sapras yang dikelola dengan baik	6	6	6	6	100%	6	18	300%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Bagan Struktur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati bungo melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai bagian yang Integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten bungo, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bungo Mempunyai Visi dan Misi sesuai Renstra 2021-2026 yaitu **VISI " Terwujudnya Tenaga kerja dan Masarakat Transmigrasi yang Berkualitas Bungo Maju dan Sejahtera"**

Dengan Misi :

1. Mewujudkan Tenaga Kerja Terampil Produktif dan Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja serta Kuantitas Tenaga Kerja .
2. Mewujudkan Hubungan industrial yang seralas,serasi dan seimbang dan meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja.
3. Mewujudkan Mobilitas Penduduk yang terarah ,Memfasilitasi Perpindahan dan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Transmigrasi.
4. Meningkatkan SDM Tata Kelolah Organisasi Pemerintah Daerah dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigasian.

Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bidang yang kompleksitas karena berkaitan langsung dengan tenaga kerja dan transmigrasi yang nota benenya adalah manusia mandiri yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai individu dan makhluk sosial. Ketidak seimbangan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari tenaga kerja akan menimbulkan permasalahan lain yang sifatnya dapat meluas dan keluar dari

kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Oleh karena itu koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
5. Peraturan Bupati Bungo tentang Susunan Organisasi Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bungo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan			20,62%	36,08%	41,24%	41,23%	17,86%	10,71%	41,24%	41,23%	
2.	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan			90,53%	90,53%	90,53%	90,53%	100%	66,48%	90,53%	90,53%	
3.	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			90%	93%	95%	97%	25,93%	68,75%	95%	97%	
4.	Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat			68,60%	76,81%	84,75%	92,38%	6,80%	7,33%	84,75%	92,38%	
5.	Persentase Satuan Permukiman yang dibina			47,50%	59,50%	61,50%	73,50%	100%	100%	61,50%	73,50%	
6.	Persentase jumlah Sarana dan prasaran yang Dikelolah dengan baik			40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100%	100%	70,00%	85,00%	

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Isu yang timbul dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD, antara lain:
1. Permasalahan yang timbul adalah masih tingginya Angka Perselisihan didalam Perusahaan yang mengharuskan Peran serta Moderator yang mampu menjembatani dalam Penyelesaian kasus antara perusahaan dan para tenaga kerja agar tercipta Kenyamanan dalam bekerja.
 2. Masih rendahnya Kualitas Tenagakerja Yang dihasilkan Keluaran Lembaga Pelatihan Swasta (LPTS) ,
 3. Masih rendahnya daya Saing Tenagakerja yang perlu dilatih di BLK maka di harapkan peran aktif UPTD Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) sebagian saranan Masyarakat dalam Mendapatkan Informasi dan tempat mendapatkan program pelatihan sebagai sarana penikatan Kompetensi angkatan kerja .
 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari Pencarikerja dalam menghadapi Tuntutan Persaingan Pasar Pencari kerja yang mengharukan para tenagakerja mampu mengoperasikan peralatan yang ada di perusahaan dengan kondisi serba modern .
 5. Untuk kegiatan Ketransmigrasian terkendala dengan masih banyaknya Inprastruktur yang belum terbangun untuk Menunjang kesejahteraan Masyarakat di wilayah Transmigrasi.
 6. Belum Tepenuhinya hak Legalitas Pelayanan Pertanahan lahan Transmigrasi
 7. Banyaknya Lahan Umum yang Tidak sesuai dengan Peruntukannya
 8. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat dalam menciptakan usaha baru yang menunjang nilai Perekonomian masyarakat di lingkungan Transmigrasi.
- b. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, antara lain:
1. Meningkatkan Pelayanan terhadap pencariai kerja
 2. Meningkatkan pelayanan penempatan TK

3. Memperluas kesempatan kerja baik didalam maupun diluar negeri
 4. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga latihan swasta guna terciptanya TK yang produktif dan kompetitif
 5. Meningkatkan pengetahuan TK secara menyeluruh melalui sosialisasi pemantauan tentang ketenagakerjaan
 6. Memberikan perlindungan terhadap TK
 7. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis diperusahaan-perusahaan
 8. Meningkatkan pembangunan SDM yang berkualitas melalui pelatihan menuju TK yang produktif dan kompetitif
 9. Meningkatkan pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat agar mampu menjadi masyarakat maju dan sejahtera
 10. Membangun ,mengembangkan dan mensinergikan sarana dan prasarana dikawasan transmigrasi
 11. Memberikan pelayanan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi dan menjamin legalitas berdasarkan peruntukannya
- c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
1. Kurangnya sarana peralatan di BLK sementara peralatan yang sudah ada kurang sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
 2. Masih lemahnya komitmen nasional baik ditingkat pemerintah pusat/daerah, swasta maupun masyarakat dalam menangani permasalahan pengangguran khususnya dalam menciptakan lapangan kerja.
 3. Masih tingginya angka permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bungo
 4. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
 5. Belum semua daerah membentuk LKS Tripartit, sementara itu, LKS Tripartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
 6. Masih tingginya tuntutan pekerja atas hak-hak normatif.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2024 disusun berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bungo 2021-2026 Nomor 10 tahun 2021 tanggal ... Desember 2021 (Lembaran Daerah Nomor 8).

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo membutuhkan tambahan personil, karena dengan tugas dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan program dan kegiatan agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo juga membutuhkan sarana dan prasarana kerja yang lengkap dan representative.

Berikut ini review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo tahun 2025.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Bungo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lembar ke 1 dari 2 Lembar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	76,50BB		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD (SAKIP)	76,50BB		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bungo	Jumlah Dokumen Perencanaan)Dinas Nakertrans yang tersedia	2 dokumen	2.285.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bungo	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra dan Renja)Dinas Nakertrans yang tersedia	2 dokumen	2.285.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah RKA tersusun	1 dokumen	2.597.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah RKA tersusun	1 dokumen	2.597.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah RKAP-SKPD tersusun	1 dokumen	2.417.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah RKAP-SKPD tersusun	1 dokumen	2.417.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah DPA - SKPD tersusun	1 dokumen	2.895.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah DPA - SKPD tersusun	1 dokumen	2.895.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah DPPA - SKPD tersusun	1 dokumen	2.607.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bungo	Jumlah DPPA - SKPD tersusun	1 dokumen	2.607.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Laporan kinerja yang tesusun	2 Laporan	19.797.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Laporan kinerja yang tesusun	2 Laporan	19.797.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terwujutnya Pengelola	100 %		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terwujutnya Pengelola Keuangan	100 %		

			Keuangan sesuai dengan SOP					sesuai dengan SOP			
	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bungo	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia	14 Bulan	3.830.637.401	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bungo	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia	14 Bulan	3.830.637.401	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Laporan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	2.893.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Laporan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	2.893.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Laporan Bulanan /Triwulan /Semester yang tersusun	4 Laporan	2.664.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Laporan Bulanan /Triwulan /Semester yang tersusun	4 Laporan	2.664.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terwujutnya laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP	3 Unit		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terwujutnya laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai SOP	3 Unit		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Kendaraan Roda empat yang diasuransikan	1 Dokumen	16.486.300	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bungo	Jumlah Kendaraan Roda empat yang diasuransikan	1 Dokumen	16.486.300	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase peningkatan SDM	100 %		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase peningkatan SDM	100 %		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bungo	jumlah pakaian dinas yang disediakan	16 Paket	12.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bungo	jumlah pakaian dinas yang disediakan	16 Paket	12.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bungo	jumlah PNS yng Mengikuti Pelatihan SDM	15 Orang	16.680.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bungo	jumlah PNS yng Mengikuti Pelatihan SDM	15 Orang	16.680.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase cakupan layanan Administrasi Perkantoran	100 %		Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase cakupan layanan Administrasi Perkantoran	100 %		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bungo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	13 Paket	5.690.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bungo	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	13 Paket	5.690.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bungo	Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang	15 Paket	25.826.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bungo	Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	15 Paket	25.826.000	

			tersedia								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bungo	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Peralatan, dan Bahan Pembersih Kantor	50 Paket	13.086.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bungo	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Peralatan, dan Bahan Pembersih Kantor	50 Paket	13.086.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bungo	Jumlah barang cetakan dan barang pengadaan yang tersedia	12 Paket	4.209.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bungo	Jumlah barang cetakan dan barang pengadaan yang tersedia	12 Paket	4.209.900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bungo	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	40 Dokumen	7.529.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bungo	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	40 Dokumen	7.529.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bungo	Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 Paket	14.326.250	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bungo	Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 Paket	14.326.250	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bungo	Jumlah makan minum yang tersedia	4 Laporan	8.859.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bungo	Jumlah makan minum yang tersedia	4 Laporan	8.859.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bungo	Jumlah kordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	68 Laporan	107.065.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bungo	Jumlah kordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	68 Laporan	107.065.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %		
	Pengadaan Mebel	Kab. Bungo	Jumlah mebeleur kantor	41 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kab. Bungo	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia	41 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan layanan perkantoran	100 %		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase cakupan layanan perkantoran	100 %		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bungo	Jumlah surat menyurat yang terkirim	2 Laporan	880.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bungo	Jumlah surat menyurat yang terkirim	2 Laporan	880.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Bungo	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Laporan	107.814.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Bungo	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Laporan	107.814.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bungo	Jumlah honorarium non pns yang	12 Laporan	263.966.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bungo	Jumlah honorarium non pns yang tersedia	12 Laporan	263.966.400	

			tersedia								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	100 %		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik	100 %		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bungo	jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dgn baik	3 Unit	73.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bungo	jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dgn baik	3 Unit	73.320.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bungo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	40 Unit	8.810.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bungo	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	40 Unit	8.810.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bungo	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	9.184.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bungo	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	9.184.900	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan			
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	320 Orang		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	320 Orang		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bungo	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	320 Orang	216.999.250	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bungo	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	320 Orang	216.999.250	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Terbinanya LKPS yang berkompeten	100 %		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Terbinanya LKPS yang berkompeten	100 %		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bungo	jumlah LKPS yang dibina	10 Lembaga	12.366.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bungo	jumlah LKPS yang dibina	10 Lembaga	12.366.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dan di			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dan di			
	Pelayanan Pencari Kerja		Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	100 %		Pelayanan Pencari Kerja		Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	100 %		
	Pelayanan antar kerja	Kab. Bungo	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan	650 Orang	57.000.200	Pelayanan antar kerja	Kab. Bungo	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	650 Orang	57.000.200	

			AKAD dan AKL								
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja (IPK)		Terwujudnya IPK online dan Penempatan Tenaga Kerja	100 %		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja (IPK)		Terwujudnya IPK online dan Penempatan Tenaga Kerja	100 %		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bungo	Jumlah Data IPK yang terlapor	500 Orang	-	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Bungo	Jumlah Data IPK yang terlapor	500 Orang	-	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bungo	Terwujudnya Perpanjangan IMTA (RPTKA)	12 TKA		Perpanjangan IMTA (RPTKA)	Kab. Bungo	Terwujudnya Perpanjangan IMTA (RPTKA)	12 TKA		
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	12 Orang	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA (RPTKA)		Jumlah TKA yang terkoordinasi	12 Orang	-	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Bungo	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Bungo	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bungo	Tersedianya data sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja	6 Perusahaan		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bungo	Tersedianya data sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja	6 Perusahaan		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan	Kab. Bungo	Jumlah sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdata	4 Laporan	5.298.880	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengupahan	Kab. Bungo	Jumlah sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdata	4 Laporan	5.298.880	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	100 %		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	100 %		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang di deteksi	40 Perkara	4.950.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang di deteksi	40 Perkara	4.950.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Kab. Bungo	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang	40 Perkara	1.452.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Kab. Bungo	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	40 Perkara	1.452.000	

	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		diselesaikan			Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi		Jumlah organisasi Serikat Pekerja/Serikat buruh yang diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.298.880	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi		Jumlah organisasi Serikat Pekerja/Serikat buruh yang diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5.298.880	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat			
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bungo	terlaksananya Penempatan Masyarakat kawasan transmigrasi	1000 KK/Orang		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bungo	terlaksananya Penempatan Masyarakat kawasan transmigrasi	1000 KK/Orang		
	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kab. Bungo	jumlah masyarakat Transmigrasi yang telah memiliki hak kepemilikan lahan	1000 KK/Orang	26.999.950	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kab. Bungo	jumlah masyarakat Transmigrasi yang telah memiliki hak kepemilikan lahan	1000 KK/Orang	26.999.950	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Berkembangnya kawasan Transmigrasi	1.05 Index		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Berkembangnya kawasan Transmigrasi	1.05 Index		
	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian		Terwujudnya pengembangan SDM kemandirian satuan permukiman transmigrasi			Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian		Terwujudnya pengembangan SDM kemandirian satuan permukiman transmigrasi			
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Bungo	jumlah masyarakat kawasan transmigrasi yang mengikuti pelatihan ekonomi Sosial dan Budaya	40 Kepala Keluarga	20.079.800	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Bungo	jumlah masyarakat kawasan transmigrasi yang mengikuti pelatihan ekonomi Sosial dan Budaya	40 Kepala Keluarga	20.079.800	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Bungo	jumlah sapras yang dikelola dengan baik	6 Satuan Permukiman	20.075.800	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab. Bungo	jumlah sapras yang dikelola dengan baik	6 Satuan Permukiman	20.075.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Bungo Sebagian besar program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung yang berasal dari musyawarah dan pembangunan baik itu dari tingkat desa sampai ketingkat Kabupaten memberikan usulan-usulan yang dapat dianggarkan melalui dana APBD.

Adapun usulan terhadap program dan kegiatan dari masyarakat pada tahun 2025 dapat kita lihat dari tabel dibawah ini

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Bungo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Sesuai dengan Kebutuhan		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bungo	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	640 Orang	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dan di		
	Pelayanan Pencari Kerja		Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		
	Pelayanan antar kerja	Kab. Bungo	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	650 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menghadapi tahun anggaran 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo arah dan kebijakan antara lain mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

- a. Agar pencari kerja dapat terlayani secara maksimal
- b. Agar pencari kerja dapat ditempatkan menjadi pekerja diperusahaan untuk mengurangi pengangguran
- c. Agar kesempatan (peluang) kerja dapat diisi dengan para pencari kerja yang telah terdaftar
- d. Agar keluaran dari LPTK dapat bersaing dipasar kerja
- e. Para pencari kerja dapat mengetahui peraturan ketenagakerjaan
- f. Para tenaga kerja dapat terlindungi dari perlakuan pengusaha yang sewenang-wenang
- g. Membentuk dan memfungsikan sarana satuan hubungan industri diperusahaan
- h. Agar keluaran/alumni BLK dapat bersaing didunia kerja
- i. Menjadikan masyarakat transmigrasi dan sekitarnya lebih berdaya dalam meningkatkan tarap hidup, status sosial, berbudaya dan berahklak baik
- j. Mewujudkan pembangunan dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat transmigrasi dan sekitarnya

- k. Terselsainya permasalahan dan legalitas lahan sertipikat hak milik transmigrasi berdasarkan peruntukannya

Sasaran :

- a. Pencari kerja terdaftar sebagai pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan
- b. Pencari kerja menjadi bekerja
- c. Perusahaan-perusahaan agar memberikan informasi lowongan kerja kepada pemerintah
- d. Peserta didik di LPTK termotifasi untuk meningkatkan kualitas
- e. Para tenaga kerja di perusahaan merasa nyaman dalam bekerja
- f. Selama-lama hubungan industrial agar lebih difungsikan
- g. Supaya siswa/i di BLK dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya
- h. Tercapainya masyarakat transmigrasi dan sekitarnya untuk lebih maju dan sejahtera
- i. Adanya kerja sama lintas sekitar untuk membangun sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi dan sekitarnya
- j. Terjaminnya legalitas kepemilikan lahan bagi warga transmigrasi dan pemanfaatan lahan umum, sosial, sebagai penunjang masyarakat transmigrasi maju dan sejahtera

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Bungo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo tahun 2021-2026 yang Berisikan Misi , Visi dan program prioritas Visi Pembangunan yakni ***Bungo maju, dan Sejahtera.*** Dengan Mejutkan Misi dari Bupati Bungo yang berisikan sebagai berikut :
 - 1. Mewujudkan Kabupaten Bungo yang maju dan berdaya saing
 - 2. Mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Bungo yang berkualitas.

3. Mewujudkan Tataan masyarakat kabupaten bungo yang tertib demokrasi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak asasi manusia.
 4. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bungo yang beriman ,bertakwa dan berbudaya.
 5. Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bungo yang Merata.
- b. Program dan kegiatan pokok Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan Pokok yang akan dilakukan :
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
 - b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK
 - c) Rehab Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BLK
 7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan Pokok yang akan dilakukan adalah :
 - a) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
 - b) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga kerja
 - c) Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
 - d) Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat.
 8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Kegiatan Pokok yang akan dilakukan adalah :
 - a) Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - b) Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- c) Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerja Bipartit.
- d) Pelaksana Deteksi Dini di Perusahaan

9. Program Peningkatan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- a) Penyediaan pengelolaan Prasarana dan sarana sosial dan ekonomi Transmigrasi
- b) Penyelesaian masalah yang ada di transmigrasi
- c) Pelaksanaan Koordinasi Program Kota Terpadu Mandiri (KTM)
- d) Pelatihan Kewirausahaan bagi warga Transmigrasi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.

maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang berasal dari dana APBD berjumlah Rp. 4.935.547.211,00.

Adapun rumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bungo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lembar ke 1 dari 6 Lembar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100%				100%	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan OPD		100%				100%	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Nakertrans yang tersedia	Kab. Bungo	2 Dokumen	2.285.000	APBD		2 Dokumen	26.000.000
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA tersusun	Kab. Bungo	1 Dokumen	2.597.000	APBD		1 Dokumen	30.000.000
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKAP-SKPD tersusun	Kab. Bungo	1 Dokumen	2.417.000	APBD		1 Dokumen	13.000.000
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD tersusun	Kab. Bungo	1 Dokumen	2.895.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000

2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA - SKPD tersusun	Kab. Bungo	1 Dokumen	2.607.000	APBD		1 Dokumen	15.000.000
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang tersusun	Kab. Bungo	2 Laporan	19.797.000	APBD		2 Laporan	49.000.000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Pengelola Keuangan sesuai dengan SOP		100%				100%	
2.07.01.2.02.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang tersedia	Kab. Bungo	14 bulan	3.830.637.401	APBD		14 bulan	4.300.477.587
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Kab. Bungo	1 Laporan	2.893.000	APBD		1 Laporan	24.000.000
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Kab. Bungo	4 Laporan	2.664.000	APBD		4 Laporan	45.000.000
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersedia		12 bln				12 bln	
2.07.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan roda empat yang diasuransikan	Kab. Bungo	3 unit	16.486.300	APBD		3 unit	80.000.000
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase peningkatan SDM		100%				100%	
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kab. Bungo	68 stel	12.500.000	APBD		69 stel	80.000.000
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pakaian dinas yang disediakan	Kab. Bungo	68 stel	16.680.000	APBD		69 stel	80.000.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase cakupan layanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kab. Bungo	13 jenis	5.690.500	APBD		13 jenis	40.000.000

2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Bungo	10 unit 8 buah	25.826.000	APBD		10 unit 8 buah	87.000.000
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Peralatan, dan Bahan Pembersih Kantor	Kab. Bungo	50 Jenis	13.086.000	APBD		50 Jenis	58.789.000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan barang penggandaan yang tersedia	Kab. Bungo	12 Jenis	4.209.900	APBD		12 Jenis	18.450.000
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	Kab. Bungo	40 jenis	7.529.000	APBD		40 jenis	45.000.000
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pameran Pembangunan	Kab. Bungo	1 Kegiatan	14.326.250	APBD		1 Kegiatan	39.500.000
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang tersedia	Kab. Bungo	1005 kotak	8.859.000	APBD		1005 kotak	25.162.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kab. Bungo	68kali	107.065.000	APBD		68kali	200.000.000
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%				100%	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia (Kursi kerja, Kursi direktur, Kursi rapat, lemari arsip, meja panjang)	Kab. Bungo	20 unit 25 buah	-	APBD		27 unit 7 buah	100.000.000
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan perkantoran		100%				100%	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Kab. Bungo	4000 Surat	880.000	APBD		4000 Surat	10.000.000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab. Bungo	12 Bulan	107.814.800	APBD		12 Bulan	158.000.000
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium non pns yang tersedia	Kab. Bungo	12 Bulan	263.966.400	APBD		12 Bulan	256.166.400
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik		100%				100%	
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara dgn baik	Kab. Bungo	3 Unit	73.320.000	APBD		3 Unit	181.429.800

2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kab. Bungo	40 Unit	8.810.000	APBD		40 Unit	20.000.000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Kab. Bungo	3 Gedung	9.184.900	APBD		3 Gedung	150.000.000
02:07:03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri		36,08%				36,08%	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi		640 orang				640 orang	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti pelatihan	Kab. Bungo	640 orang	216.999.250	APBD		640 orang	195.121.951
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya LKPS yang berkompeten		10 LPKS				10 LPKS	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah LPKS yang dibina	Kab. Bungo	10 LPKS	12.366.000	APBD		10 LPKS	
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan		90,53%		APBD		90,53%	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		90,53%				90,53%	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Kab. Bungo	650 orang	57.000.200	APBD		650 orang	50.000.000
2.07.04.2.03	Pelayanan Informasi Pasar Kerja	Terwujudnya IPK Online dan Penempatan Tenaga Kerja							
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tersedianya Informasi Pasar Kerja	Kab. Bungo	500 data	-	APBD		500 data	30.000.000
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perpanjangan IMTA (RPTKA)		12 TKA				12 TKA	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang terkoordinasi	Kab. Bungo	12 TKA	-	APBD		12 TKA	40.000.000
02.07.05	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja		93%				93%	

		yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data sarana hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja		8 Perusahaan				8 Perusahaan	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang terdata	Kab. Bungo	8 Perusahaan	5.298.880	APBD		8 Perusahaan	65.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha		93%				93%	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang di deteksi	Kab. Bungo	55 Perusahaan	4.950.000	APBD		65 Perusahaan	60.000.000
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	Kab. Bungo	40 Kasus	1.452.000	APBD		40 Kasus	42.000.000
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah organisasi Serikat Pekerja/Serikat buruh yang diverifikasi	Kab. Bungo	10 Serikat	5.298.880	APBD		10 Serikat	35.000.000

03.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Tanah di Kawasan Transmigrasi yang Bersertifikat		76.81%				76.81%	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penempatan Masyarakat Di Wilayah Transmigrasi							
3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	jumlah masyarakat Transmigrasi yang telah memiliki hak kepemilikan lahan	Kab. Bungo	1000 KK/Orang	26.999.950	APBD		1000 KK/Orang	155.000.000
03.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman yang dibina dan jumlah Sarana dan prasaran yang Dikelolah dengan baik		57,25%				57,25%	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian	Persentase Satuan Pemukiman pada tahap Kemandirian terbina dan dikelola dengan baik		57,25%				57,25%	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah masyarakat kawasan transmigrasi yang mengikuti pelatihan ekonomi Sosial dan Budaya	Kab. Bungo	40 orang	20.079.800	APBD		40 orang	95.000.000
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	jumlah sarana yang dikelola dengan baik	Kab. Bungo	6 unit	20.075.800	APBD		6 unit	120.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran semstara (PPAS) dan APBD.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang

Muara Bungo, 02 Januari 2025

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**



ZAMRONI, S.Ag.

NIP. 19700914 199201 1 003